

Mata Kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

**(pertemuan 8)
Demokrasi dan Problematikanya**

**Drs. SAPTO WALUYO, M.Sc.
sapto.waluyo@nurulfikri.ac.id**

Pengertian Demokrasi

Secara **etimologi**, Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. 'Demos' berarti rakyat dan 'Kratos/kratein' berarti kekuasaan. Makna dasarnya: **'rakyat yang berkuasa'**.

Demokrasi diartikan sebagai **'pemerintahan atau kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'**.



Pemerintahan

Dari rakyat artinya Presiden, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa sebagai pemimpin politik telah dipilih dan mendapatkan mandat dari rakyat.

Oleh rakyat artinya negara dijalankan melalui mandat sehingga rakyat menjadi pengawas pemerintahan, yang dijalankan oleh wakil rakyat.

Untuk rakyat artinya Pemerintah bekerja sebagai pelayan rakyat, hasil kerja dan kebijaksanaan diarahkan demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Unsur Pemerintahan Demokratis

1. **Keterlibatan warga** negara dalam pembuatan keputusan politik
2. **Persamaan hak dan kewajiban** di antara warga negara.
3. **Tingkat kebebasan** atau kemerdekaan untuk seluruh warga negara.
4. Sistem **lembaga perwakilan**.
5. **Sistem pemilihan** berdasarkan suara mayoritas.

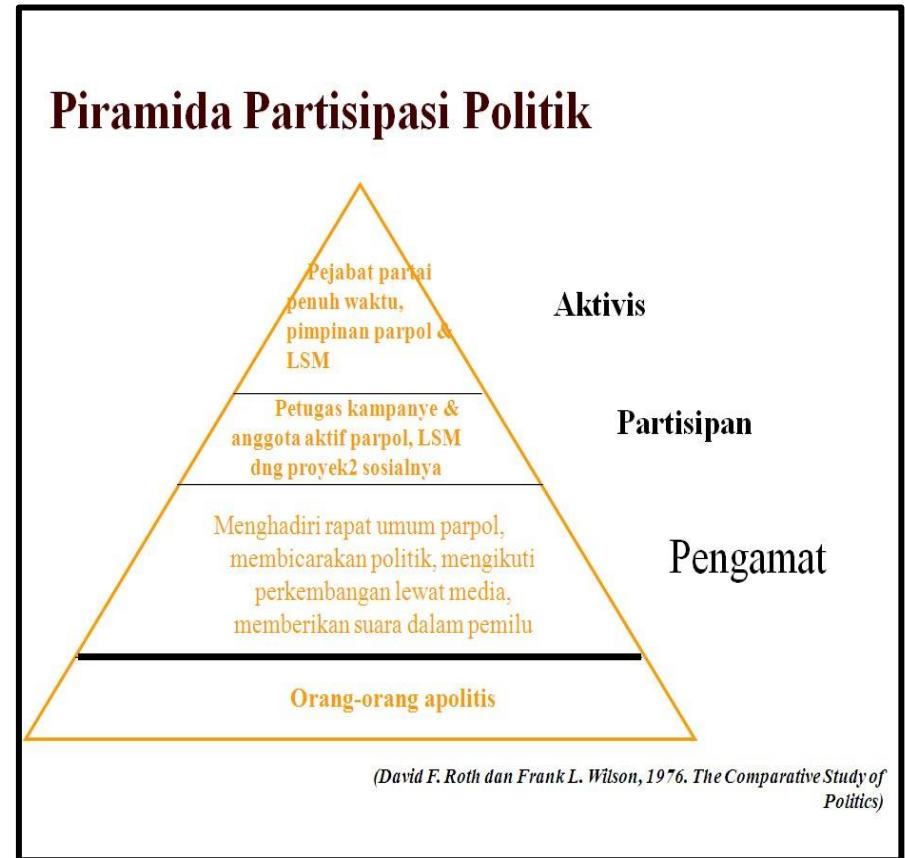
Supra dan Infra Struktur Demokrasi

Supra Struktur:

1. Legislatif → DPR, DPD, MPR
1. Eksekutif → Presiden
2. Yudikatif → MA, MK

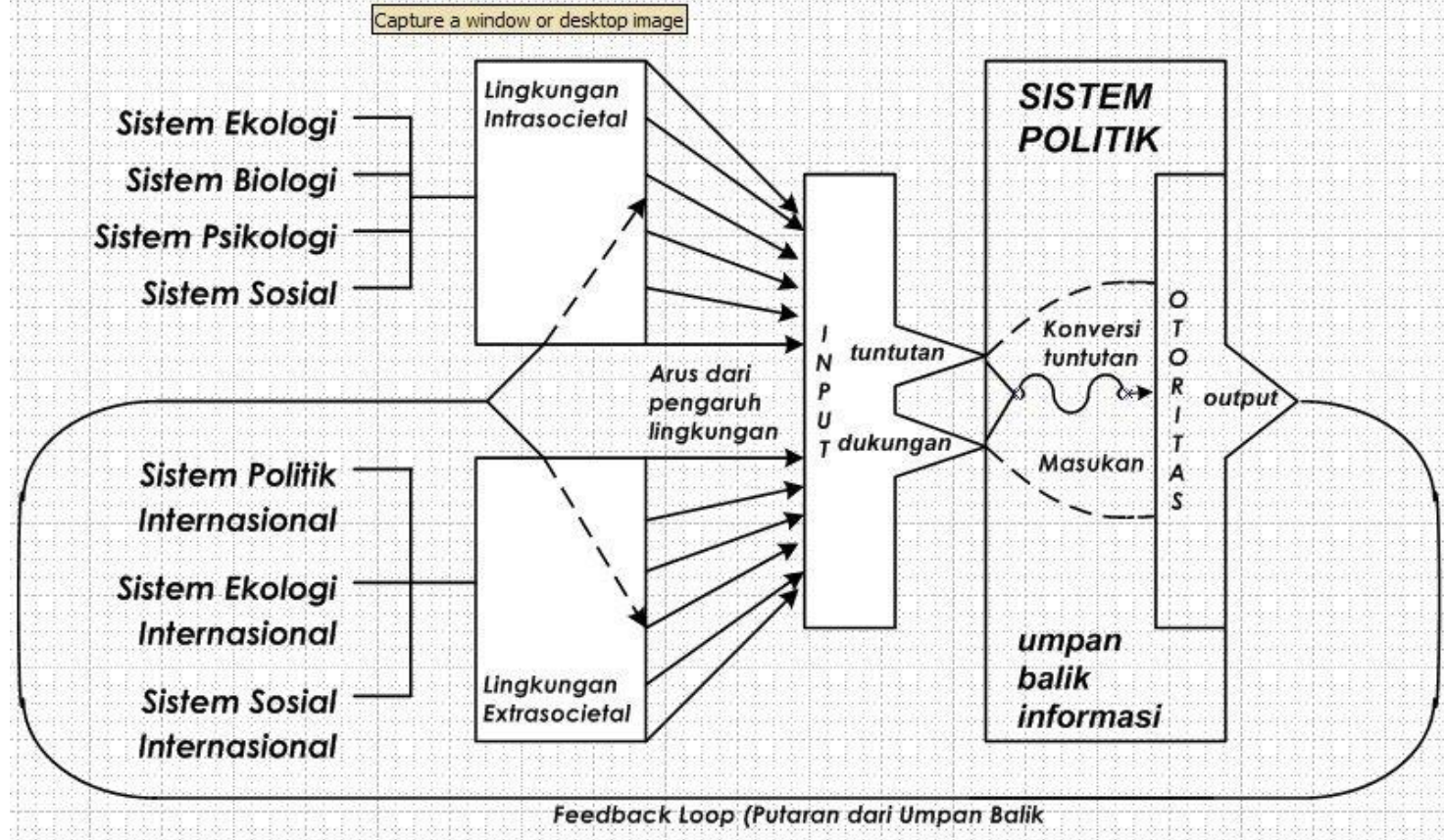
Infra Struktur:

1. Partai Politik
2. Organisasi Masyarakat
3. Kelompok Penekan (LSM, Kampus, Media)



Proses Politik

Model Arus Sistem Politik



Manfaat Demokrasi

1. Wujud **kedaulatan Rakyat**
2. **Kesetaraan** bagi seluruh Warga Negara
3. Memenuhi **kepentingan umum**
4. Menjaga **kemajemukan** dan titik temu
5. Menjamin **hak-hak dasar** warga
6. Pembaruan **kehidupan sosial** → mobilitas

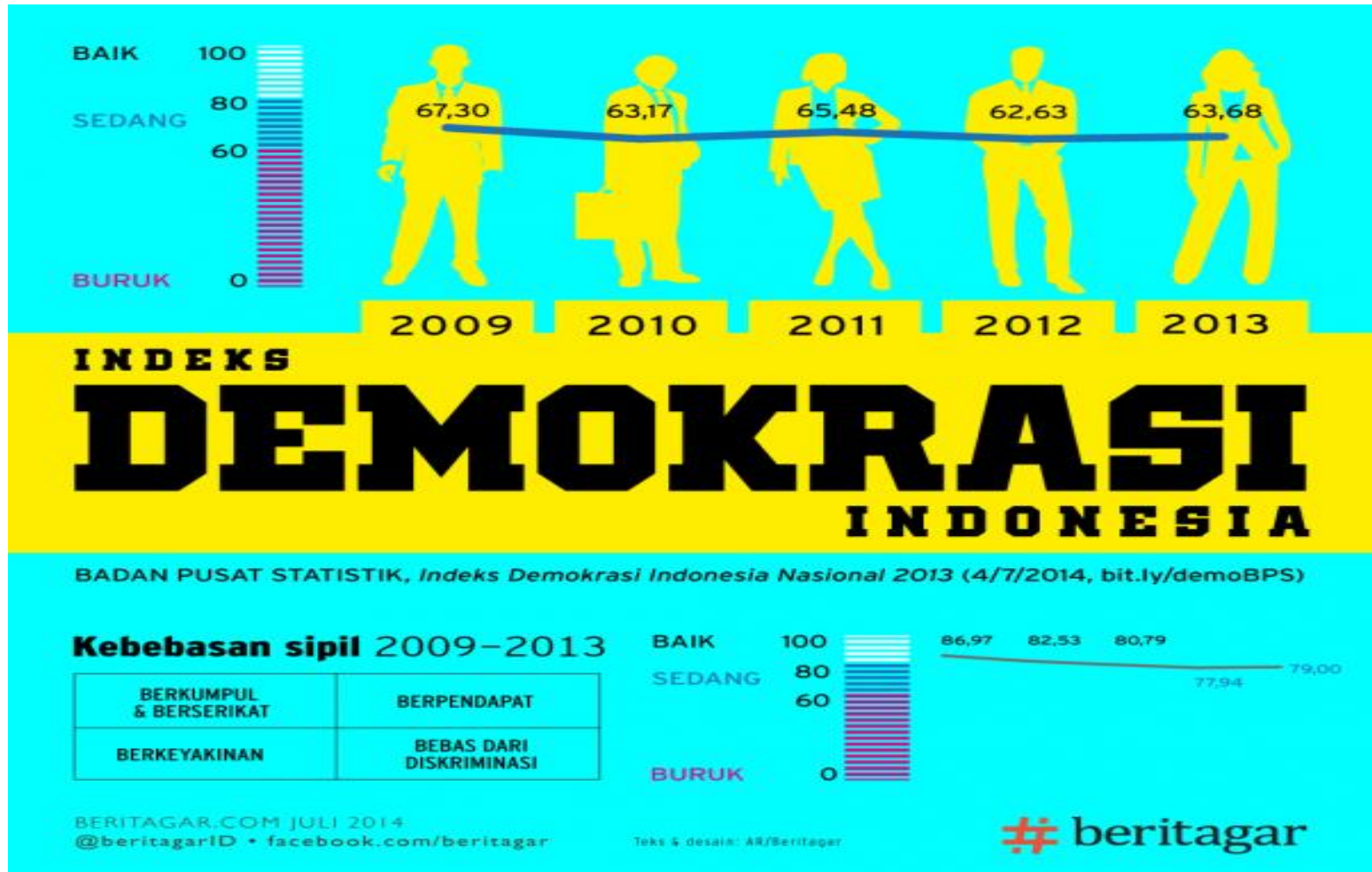
Nilai-nilai Demokrasi

1. **Kesadaran** akan kemajemukan masyarakat
2. Sikap **jujur** dan pikiran sehat
3. **Kerja sama** antar warga dan itikad baik
4. Sikap **dewasa** di kalangan tokoh politik
5. Pertimbangan **moral** terhadap setiap kebijakan

Parameter Demokrasi

1. Pembentukan pemerintahan melalui pemilu
2. Sistem pertanggungjawaban pemerintahan
3. Pengaturan distribusi kekuasaan negara
4. Pengawasan oleh rakyat (melalui parpol, ormas, media massa, LSM, kampus dll)

Indeks Demokrasi Indonesia



Jenis-jenis Demokrasi

- A. Berdasarkan Cara menyampaikan pendapat
- B. Berdasarkan Prinsip Ideologi
- C. Berdasarkan Wewenang dan Hubungan antar alat Kelengkapan Negara

Demokrasi

(A. Berdasar Cara Menyampaikan Pendapat)

1. Demokrasi **langsung**: rakyat ikut serta secara langsung menentukan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.
2. Demokrasi **tidak langsung** (Perwakilan): kekuasaan rakyat dijalankan wakil-wakilnya di Parlemen yang dipilih melalui Pemilu.

Demokrasi

(B. Berdasarkan Prinsip Ideologi)

1. Demokrasi **Liberal**: memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari.
2. Demokrasi **Proletar**: bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum, politik.
3. Demokrasi **Relijius** (Theo-democracy): berdasarkan nilai-nilai spiritual keagamaan. Produk hukum dan kebijakan harus sejalan dengan nilai spiritual.

Demokrasi

(C. Berdasarkan Hubungan Lembaga Negara)

1. Demokrasi **Parlementer**:

- **DPR** lebih kuat daripada pemerintah.
- Kepala pemerintahan/eksekutif disebut **Perdana Menteri** dan memimpin kabinet dengan sejumlah menteri yang bertanggung jawab kepada DPR.
- Program kebijakan **Kabinet** disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.
- Kedudukan **Kepala Negara** terpisah dari Kepala Pemerintahan, biasanya hanya berfungsi sebagai simbol Negara
- Jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR (parlemen) dapat meminta **mosi tidak percaya** kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah.

Demokrasi

(C. Berdasar Hubungan Lembaga Negara)

2. Demokrasi **Presidensial**:

- Negara dikepalai **Presiden**.
- Kekuasaan **eksekutif** Presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dan oleh rakyat langsung.
- Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan **menteri**.
- Menteri tidak bertanggungjawab kepada DPR, melainkan kepada presiden.

Pendidikan Demokrasi

- Mempersiapkan **warga masyarakat** agar berpikir kritis dan bersikap demokratis.
- Sehingga setiap **warga negara** mengerti, menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis.
- Pendidikan demokrasi bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktek demokrasi, tetapi juga menghasilkan masyarakat dan warga negara yang **berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu, dan berpandangan jauh ke depan.**

Demokratisasi

Suatu **perubahan masyarakat**, baik perlahan (evolusi) maupun secara cepat (revolusi) ke arah demokrasi. Demokratisasi menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Jika demokratisasi tidak dilakukan, maka bayaran yang harus diterima adalah “perang saudara yang menumpahkan darah, dan kemunduran ekonomi dengan sangat parah”. (B.J. Habibie, 2005).

Demokratisasi di suatu sistem pemerintahan memerlukan **proses yang tidak mudah**. Pada saat perubahan terjadi, selalu ada orang yang tidak ingin melakukan perubahan terus-menerus (*constraints of change*), atau ada manusia yang tidak mampu menyesuaikan diri. Dalam kontes demokratisasi, peran individu yang mampu menerima perubahan sosial-politik itu sangat penting.

Masyarakat Madani

Masyarakat yang demokratis dan menghargai *human dignity* atau hak-hak dan tanggung jawab manusia (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Dalam frasa bahasa Latin, masyarakat madani merupakan padanan “**civillis societies**”. Artinya, masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab. Dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah “**civil society**”, artinya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.

Masyarakat yang merujuk pada **masyarakat Islam** yang pernah dibangun Nabi Muhammad Saw di negeri Madinah. Masyarakat sebagai kota atau berkeadaban tinggi dengan ciri antara lain: egalitarianisme, menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah. (Nurcholis Madjid)

Problematika Demokrasi

1. Demokrasi telah berlangsung secara **formal-prosedural**, namun secara substansial masih banyak penyimpangan semisal *money politics* & politik dinasti.
2. **Etika politik** antara penyelenggara negara (legislatif-eksekutif-yudikatif) juga lemah.
3. **Sistem Presidensial dengan Multipartai** tak selalu ideal. Banyak komplikasi dalam pelaksanaan kedaulatan Rakyat.

Democracy – Money Politics



Solusi

1. **Pendidikan Kewarganegaraan** harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dari akar rumput, kelas menengah hingga lapisan atas; yang terdidik maupun masyarakat awam.
2. **Pelaksanaan dan penguatan Etika Kehidupan Berbangsa** (Ketetapan MPR Nomor VI/2001) dan TAP Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme; melalui pengawasan masyarakat.
3. **Kesepakatan nasional** (*gentleman agreement*) tentang Sistem Politik Nasional yang sesuai tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat.



“Jika Anda mengimpor gelas dan mengimpor meja, berarti Anda membayar jam kerja orang asing di negerinya. Bayarlah jam kerja rakyat kita sendiri, sehingga semua bisa mandiri.”
(Presiden B.J. Habibie, 1998-1999)

